

	News Title : Cegah Pencucian uang, Bappebti Gandeng Ditjen Dukcapil Kemendagri	
	Media Name : Validnews.id	Journalist : -
	Publish Date : 23 December 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Kerja Sama Dukcapil

Beranda > Ekonomi > Berita

> EKONOMI

23 Desember 2022 | 08:00 WIB

Cegah Pencucian uang, Bappebti Gandeng Ditjen Dukcapil Kemendagri

Kerja sama dengan Dukcapil mengatur proses penerimaan nasabah oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Editor: Fin Harini



Bappebti Kementerian Perdagangan menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Kamis (22/12/2022). *Kemendag/Duk*

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup tugas Bappebti. Tujuan kerja sama ini adalah mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Plt Kepala Bappebti Kemendag Didid Noordiatmoko menyatakan, harmonisasi penggunaan data kependudukan berperan penting dalam mendukung transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti.

"Penandatanganan ini adalah wujud harmonisasi untuk mendukung transparansi atas implementasi ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dalam rangka pemanfaatan data kependudukan," kata Didid lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (22/12).

Hal itu, lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan Didid Noordiatmoko dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh pada Kamis (22/12).

Didid menambahkan, PKS mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. PKS juga mengatur soal proses penerimaan nasabah dan/atau pelanggan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Didid menyampaikan, tantangan dalam era globalisasi dan industri digital ke depannya menempatkan basis teknologi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan, baik yang bersifat operasional maupun teknis.

Oleh karena itu, Bappebti memandang perlu memiliki PKS langsung dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagi setiap pelaku usaha pun wajib memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hal itu diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bahwa pengguna pusat dapat mengajukan pemberian hak akses yang tahapannya telah diatur dalam Pasal 7 Permendagri No.102 Tahun 2019.

Tahapan tersebut salah satunya memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 mempersyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

"Diharapkan dengan perjanjian kerja sama ini, kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas," kata Didid.

Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi kerja sama itu dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya.

Adapun Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasi atas penandatanganan PKS tersebut.

"Data kependudukan dapat digunakan untuk verifikasi. Kemendagri berkomitmen terus memperbaiki data kependudukan agar tetap jelas dan bersih," ujar Zudan.